

Dr. Praptining Sukowati, SH. MSI

PERUBAHAN SOSIAL & KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN



an
sarjana
LANG

B
Bayumedia

**PERUBAHAN SOSIAL
&
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Dr. Praptining Sukowati, SH., MSi

Diterbitkan oleh :



**Bayumedia Publishing
Anggota IKAPI**

Jl. Bukit Barisan No 23, Malang
Telp/Fax : (0341) 56 83 23
e-mail : bayumedia@yahoo.com

Cetakan Pertama, juni 2011
16,5 x 24, xii + 236 Halaman

ISBN : 978-602-9136-61-6

Setting Layout & Editor : Vicky Nelwan
Desain Cover : Mahendra DHS

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku kedalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotocopy, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6)

Kata Pengantar

Direktur Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang

Sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sehingga diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Banyaknya kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai program dan strategi pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen Agenda 21 Indonesia, yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro tahun 1992. Agenda 21 Indonesia merumuskan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi empat area yaitu pelayanan masyarakat, pengelolaan limbah, pengelolaan sumberdaya tanah, dan pengelolaan sumberdaya alam. Keempat area tersebut bisa tercapai bila melibatkan partisipasi semua stakeholder yang meliputi Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha. Hal ini berarti bahwa fokus pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada *dimensi social-ekonomi*, utamanya pengentasan kemiskinan, karena sebagian besar masyarakat masih berada dibawah garis kemiskinan.

Pelayanan masyarakat termasuk perubahan *pola produksi dan konsumsi*, adanya perubahan pola produksi dan konsumsi di Indonesia mengindikasikan bahwa proses-proses produksi dan eksploitasi sumberdaya alam di Indonesia akan semakin meningkat. Dengan demikian kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumberdaya alam ini diperlukan tidak

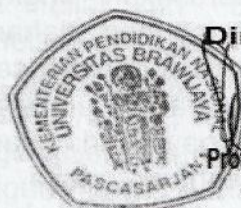
saja untuk kepentingan bangsa Indonesia, melainkan juga untuk masyarakat dunia secara keseluruhan dan berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di amanatkan dalam UU 32 tahun 2009 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah merupakan upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Buku dengan judul "**Perubahan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**" yang ditulis saudara DR Praptining Sukowati, SH, MSi ini perlu dibaca, dalam rangka penguatan wawasan kita terhadap kelestarian lingkungan hidup yang utamanya adalah sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap keberlangsungan lingkungan dan ekosistem serta wujud partisipasi terhadap kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Adanya laju pembangunan yang terus mengalami peningkatan adalah sebagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya atau mencapai pertumbuhan ekonomi, namun juga semakin berdampak pada semakin tingginya pencemaran dan kerusakan dan atau degradasi lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan menjadi rusak. Dalam konteks mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, akan mengakibatkan menurunkannya kuantitas dan kualitas sumberdaya alam (*natural resources*) pada kurun waktu tertentu. Exploitasi sumberdaya yang meningkat dari waktu ke waktu, tentu akan menguras sumberdaya alam yang tersedia (*natural resources stocks*) dan akhirnya sistim ekonomi akan kacau, selanjutnya meningkatnya produksi yang diikuti oleh meningkatnya konsumsi barang dan jasa akan meningkatkan pula limbah (*waste products*) sehingga mengurangi kualitas lingkungan itu sendiri. Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota

masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang-perseorangan, organisasi atau asosiasi lingkungan hidup (seperti Ikatan Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (INKALINDO), lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Semoga buku ini bermfaat bagi kita semua. Salam Lestari.

Malang, Juni 2011



Direktur,

[Handwritten signature]
Prof. DR. Soemarno, MS



Kata Pengantar

Kepala Bidang WASDAL Pencemaran Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Disadari sepenuhnya bahwa adanya perubahan sosial yang berdampak pada perubahan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik dan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, telah berakibat pada terjadinya perubahan ekosistem dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan seharusnya tidak hanya berdasarkan pada *profit oriented* semata, namun juga harus berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensinergikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam dalam menopang pelaksanaannya.

Buku "**Perubahan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**" yang ditulis oleh saudari Dr. Praptining Sukowati, SH., MSi ini diluncurkan pada waktu yang sangat tepat. Mengingat kondisi yang terjadi saat ini, dimana pertumbuhan penduduk yang relatif cepat berimplikasi pada ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak bisa bertambah sehingga menambah beban lingkungan hidup. Daya dukung alam ternyata semakin tidak seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk. Atas dasar inilah, eksploitasi sistematis terhadap lingkungan secara terus menerus dilakukan dengan berbagai cara dan dalih.

Sementara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebenarnya diharapkan dapat memberi kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia ternyata juga harus dibayar amat mahal, karena dampak negatifnya terhadap kelestarian lingkungan. Pertumbuhan industri, sebagai hasil rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi terbukti telah membuat erosi tanah dan pencemaran limbah pada tanah pertanian yang menyebabkan terjadinya proses penggaraman (*salinisasi*) atau penggurunan (*desertifikasi*) pada lahan produktif. Supaya dampak negatif yang ditimbulkan tidak semakin memburuk, maka perlu dilakukan berbagai langkah pencegahan, di antaranya melalui penegakan hukum.

Untuk itu pemerintah harus semaksimal mungkin melaksanakan tugas pengawasan, yang dilakukan secara benar, cermat, dan bertanggung jawab serta tetap memegang teguh etika dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain juga diharapkan agar selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme di bidang teknis pengawasan dan penyidikan tindak pidana lingkungan. Sebagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan adalah tercapainya standar kesejahteraan hidup manusia dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam serta tetap tersedianya sumber daya yang diperlukan.

Meluasnya berbagai dampak lingkungan akan semakin mengancam keberlanjutan fungsi ekosistem. Untuk itu maka pembangunan yang berwawasan lingkungan haruslah berorientasi pada kebutuhan pokok hidup manusia, pemerataan sosial, dan peningkatan kualitas hidup, serta pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu pembangunan harus berpandangan jauh ke depan yang dirumuskan sebagai visi dan misi pembangunan, dan dapat diimplementasikan ke dalam pembangunan jangka panjang secara ideal yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pembangunan yang dimaksud adalah tercapainya peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui pengembangan kecerdasan, pengembangan teknologi, ketrampilan dan moral pembangunan sumber daya manusia yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta seni untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkesinambungan.

Berhasil atau tidaknya, sangat tergantung pada strategi kebijakan pembangunan yang dijalankan. Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Mengingat kompleksnya permasalahan yang ada di dalam pengelolaan lingkungan hidup maka dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi dan sosial budaya, serta lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling bergantung dan saling memperkuat satu sama lain.

Surabaya, Juni 2011

Kepala Bidang Wasdal Pencemaran Lingkungan,



GUSO BILOWOSEN O.S.P., S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19600902 198603 1 013

Kata Pengantar

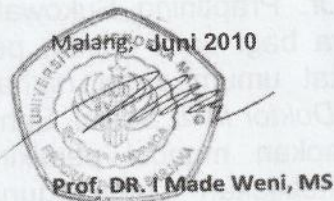
Ketua Program Doktor Ilmu Sosial
Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang

Perubahan sosial dan pembangunan merupakan dua bidang kajian yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan sosial. Apabila dikaitkan dengan perkembangan pemerintahan, maka kajian ini merupakan salah satu aspek integral atau produk dari perkembangan kehidupan masyarakat yang disebut perubahan sosial. Perubahan sosial dialami oleh setiap masyarakat yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan perubahan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial dapat meliputi semua segi kehidupan masyarakat, yaitu perubahan dalam cara berpikir dan interaksi sesama warga menjadi semakin rasional, perubahan dalam sikap dan orientasi kehidupan ekonomi menjadi makin komersial, perubahan tata cara kerja sehari-hari yang makin ditandai dengan pembagian kerja pada spesialisasi kegiatan yang makin tajam, perubahan dalam kelembagaan dan kepemimpinan masyarakat yang makin demokratis, dan perubahan dalam tata cara serta alat-alat kegiatan yang makin modern, efisien, dan sebagainya. Perubahan sosial mencakup dua unsur utama yaitu, perubahan yang terjadi kepada birokrasi dan kepada masyarakat umum sebagai kelompok sasaran program sosial dalam periode tertentu. Secara umum, kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari dan memahami perubahan sosial dan pembangunan adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep perubahan sosial ke dalam bidang atau sektor pembangunan di Indonesia.

Buku dengan judul "***Perubahan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan***" yang ditulis saudari Dr. Praptining Sukowati, SH., MSi ini perlu dibaca, khususnya bagi para dosen, pejabat/aparatur publik ataupun masyarakat umum serta mahasiswa yang sedang studi di *Program Doktor Ilmu Sosial*. Sehingga setelah membaca buku ini diharapkan muncul pemikiran dan gagasan baru terkait dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta proses perubahan sosial yang

sedang terjadi. Yaitu suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat, mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material maupun non material.

Adanya fenomena yang terjadi dengan adanya issue *global warming* disertai dengan maraknya globalisasi yaitu suatu keadaan di mana segenap aspek perekonomian (seperti pasokan dan permintaan bahan baku, informasi, transportasi tenaga kerja, keuangan distribusi, serta kegiatan-kegiatan pemasaran) menyatu secara terintegrasi dan semakin terjadi ketergantungan satu sama lain dengan skala internasional, menjadikan kita semua harus waspada, semakin berpikir, dan bertindak bijak untuk menyikapinya. Dalam pendekatan konflik *Dahrendorf*, dikatakan bahwa sumber perubahan sosial adalah adanya konflik yang intensif di antara berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda-beda (*interest groups*). Dimana mereka masing-masing memperjuangkan kepentingan dalam suatu wadah masyarakat yang sama sehingga terjadilah konflik, terutama antara kelompok yang berkepentingan untuk mempertahankan kondisi yang sedang berjalan (*status quo*), dengan kelompok yang berkepentingan untuk mengadakan perubahan kondisi masyarakat. Kiranya buku ini menarik untuk bahan diskusi kita bersama, khususnya dalam rangka menciptakan pembangunan kesejahteraan yang selama ini telah kehilangan nilai kemanusiaannya. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua terutama dalam rangka menyikapi dampak akibat dari globalisasi, seperti dampak terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi, aspek kesehatan, aspek kemiskinan dan aspek lingkungan hidup.



Kata Pengantar

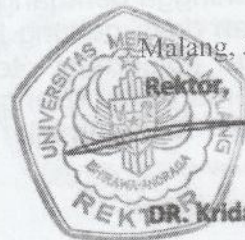
Rektor Universitas Merdeka Malang

Selama ini permasalahan kemiskinan menjadi salah satu pemicu terjadinya tekanan terhadap lingkungan yang luar biasa. Degradasi dan kerusakan lingkungan sulit dihindarkan ketika penduduk masih dililit kemiskinan. Adanya penduduk Indonesia lebih dari 110 juta masih hidup dalam kemiskinan dengan penghasilan kurang dari US\$ 2 per hari, bahkan menurut UNDP sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara yang bertempat tinggal di Indonesia intensitas pemanfaatan sumber dayanya semakin tinggi karena sebagai satu-satunya tempat bergantung bagi kelangsungan hidup mereka. Jumlah penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya perubahan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi orang miskin. Sehingga diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai solusi pemecahannya.

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru baik lihat secara global maupun nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik, sehingga selama ini masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat implementasi kebijakan dan pengaturannya. Sebagai konsep pembangunan yang berkelanjutan mengandung pengertian sebagai pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup. Hal tersebut telah menjadi topik pembicaraan dalam Konferensi *Stockholm (UN Conference on the Human Environment)* tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Dalam konferensi *Stocholm* tersebut membicarakan permasalahan lingkungan dan pemecahannya, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (*eco-development*). Dilaksanakannya konferensi tersebut sejalan dengan keinginan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi.

Bertepatan dengan diumumkannya Strategi Pembangunan Internasional bagi Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (*The Second UN Development Decade*), menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta Internasional guna menanggulangi proses pemerosotan kualitas lingkungan hidup agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia. Dalam hal ini telah mencurahkan perhatian kepada usaha melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara yang sedang berkembang, dengan sinergitas antara kebijakan bidang lingkungan hidup dengan rencana pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Amanat inilah yang kemudian dikembangkan dan menjadi hasil dari Konferensi *Stocholm* yang dapat dianggap sebagai dasar-dasar atau cikal bakal konsep pembangunan berkelanjutan yang tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-undangan nasional di bidang lingkungan hidup. Buku dengan judul "**Perubahan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**" yang ditulis saudara Dr. Praptining Sukowati, SH., MSi, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik perlu dibaca, mengingat adanya tekanan aktifitas sekelompok manusia yang semakin menguat dibanding dengan adanya laju pemulihan sumber daya alam yang lambat maka akan terjadi degradasi bahkan kerusakan sumber daya alam yang semakin cepat. Selanjutnya adanya tekanan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam tentu juga akan memperlambat pemulihan sumber daya alam. Sehingga diperlukan kebijakan pengelolaan lingkungan yang sinergi dengan pembangunan berkelanjutan, agar peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.



Malang, Juni 2011

Rektor,

REK DR. Kridawati Sedhana, MS

Pengantar Penulis

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kuasa dan limpah-Nya kami telah dapat menyelesaikan buku "**Perubahan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**". Dalam pendekatan ekuilibrium menyatakan bahwa terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat adalah karena terganggunya keseimbangan di antara unsur-unsur dalam system sosial di kalangan masyarakat yang bersangkutan, baik karena adanya dorongan dari faktor lingkungan ekstern yang memerlukan penyesuaian (adaptasi) dalam sistem sosial (*Talcott Parsons*), maupun karena terjadinya ketidakseimbangan internal seperti yang dijelaskan dengan Teori kesenjangan Budaya (*cultural lag*) oleh *William Ogburn*. Sedangkan dalam pendekatan modernisasi yang dipelopori oleh *Wilbert More*, *Marion Levy*, dan *Neil Smelser*, pada dasarnya merupakan pengembangan dari pikiran-pikiran *Talcott Parsons*, dengan menitikberatkan pandangannya pada kemajuan teknologi yang mendorong modernisasi dan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang besar dan nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk perubahan dalam organisasi atau kelembagaan masyarakat. Akhirnya tanpa disadari adanya perubahan tersebut menyebabkan pergeseran pembangunan yang mengarah pada *profit oriented* dan berdampak pada kerusakan lingkungan, dan bukan lagi pada peningkatan kesejahteraan sosial (*Social Welfare*).

Buku "**Perubahan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**", ini berusaha menyampaikan fenomena dan kondisi nyata perubahan sosial dan dampaknya pada pelaksanaan pembangunan yang kurang memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terpinggirkan dengan kepentingan-kepentingan sosial politik dan ekonomi. Adanya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Sejalan dengan kewenangan yang lebih besar tersebut, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, guna membiayai pe-

laksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah mereka masing-masing. Dalam hal ini Pemerintah Daerah diharapkan bisa mampu menggali potensi daerahnya secara optimal untuk meningkatkan taraf kemakmuran rakyatnya. Berdasarkan hukum *Ronald Cause* (pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 1991), *di alam semesta tidak ada yang gratis, jika seseorang mengambil sesuatu dari alam (termasuk mengambil manfaat) maka harus diimbangi dengan pemberian kompensasi, agar terjadi keseimbangan neraca aliran energi dan materi. Jika ada seseorang mengambil sesuatu tanpa memberi kompensasi maka ada orang lain yang akan memikul kerugian*".

Berdasarkan hukum *Ronald Cause* tersebut diatas, maka setiap industri tidak boleh membuang limbah ke media lingkungan tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Biaya pengolahan limbah merupakan salah satu kompensasi yang diberikan oleh para pelaku industri yang telah memanfaatkan jasa lingkungan sebagai sarana pembuangan limbah. Implikasi dari hukum *Ronald Cause* adalah merubah pos biaya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan dari biaya eksternal menjadi biaya internal. Sehingga sulit dihindarkan, apabila intensitas tekanan terhadap lingkungan terus menerus terjadi, maka upaya pembangunan berwawasan lingkungan menjadi salah satu cara yang diperlukan agar lingkungan tetap terjaga keberadaannya. Kekeliruan pengelolaan lingkungan akan berdampak fatal pada kerusakan lingkungan yang berkepanjangan hingga tanpa dapat diperbaiki lagi sehingga dalam jangka panjang akan berakibat pada bencana lingkungan.

Malang, Juni 2011

Penulis

Daftar Gambar

Kata Pengantar	1
Kata Pengantar Direktur Program Pascasarjana	1
Universitas Brunei Darussalam	1
Kata Pengantar Kepala Bidang PAS	1
Gambar 1 : Aspek Sosial Ekonomi Pada Etnis Cina Masa Dahulu Dan Masa Kini	9
Gambar 2 : <i>Scheme of sustainable development: at the confluence of three preoccupations</i>	14
Gambar 3 : Model Pembangunan Kesejahteraan	28
Gambar 4 : Hubungan Perubahan Sosial dengan Perubahan Kebudayaan	47
Gambar 5 : Dampak Dinamika dan Perubahan Masyarakat dalam Kumulatif Kemiskinan Perkotaan	53
Gambar 6 : Lima Gaya Menejemen Konflik	124
Gambar 7 : Posisi Pendekatan Transaktif	182
Gambar 8 : Skema Daur Ulang Perilaku Manusia	216
> Dilema dan Lingkungan Perubahan Sosial	2
> Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Keadilan	32
> Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan	33
Bagian Kedua	
DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN	
> Fasilitas Pembangunan	40
> Arah Perubahan Sosial	43
> Dampak Perubahan Sosial terhadap Pembangunan	46
> Dinamika dan Perubahan Masyarakat dalam Pembangunan	50
Bagian Ketiga	
UNSUR-UNSUR & TIPE-TIPE PERUBAHAN SOSIAL	
> Unsur-Unsur Perubahan Sosial	50
> Tipe-Tipe Perubahan	59
• Perubahan Paradigma	58
• Perubahan Kebudayaan	57
• Perubahan Sosial Evolusi	65
• Perubahan Revolusi Sosial	70
• Perubahan Sosial Terencana dan Tidak Terencana	71
• Perubahan Sosial Berpengaruh Kecil dan Besar	73
• Perubahan Lambat dan Perubahan Cepat	73

Daftar Isi

Kata Pengantar Direktur Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang	iii
Kata Pengantar Kepala Bidang WASDAL Pencemaran Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	vi
Kata Pengantar Ketua Program Doktor Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Unmer Malang.....	ix
Kata Pengantar Rektor Universitas Merdeka Malang	xi
Pengantar Penulis	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Isi	xvii

Bagian Pertama

PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

➤ Definisi dan Lingkup Perubahan Sosial	2
➤ Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Kesejahteraan	12
➤ Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan	35

Bagian Kedua

DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN

➤ Realitas Pembangunan.....	40
➤ Arah Perubahan Sosial.....	43
➤ Dampak Perubahan Sosial terhadap Pembangunan	46
➤ Dinamika dan Perubahan Masyarakat dalam Pembangunan	50

Bagian Ketiga

UNSUR-UNSUR & TIPE-TIPE PERUBAHAN SOSIAL

➤ Unsur-Unsur Perubahan Sosial	56
➤ Tipe-Tipe Perubahan	66
• Perubahan Peradaban	66
• Perubahan Kebudayaan	67
• Perubahan Sosial Evolusi	68
• Perubahan Revolusi Sosial	70
• Perubahan Sosial Terencana dan Tidak Terencana....	71
• Perubahan Sosial Berpengaruh Kecil dan Besar.....	73
• Perubahan Lambat dan Perubahan Cepat.....	73

Bagian Keempat

PENDEKATAN TEORI-TEORI SOSIAL

➤ Teori <i>Barrington Moore</i>	76
➤ Teori Perilaku Kolektif.....	78
➤ Teori Klasik	79
➤ Teori Moderen.....	89
➤ Teori Modernisasi dan Teori Ketergantungan.....	93

Bagian Kelima

FAKTOR PENDORONG & PENGHAMBAT PERUBAHAN SOSIAL

➤ Faktor Pendorong Proses Perubahan	102
➤ Faktor Penghambat Proses Perubahan	105

Bagian Keenam

STRATEGI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN BERKEADABAN

➤ Strategi Pembangunan Gotong Royong	113
➤ Strategi Pembangunan Konflik	118

BAGIAN KETUJUH

KONSEP PEMBANGUNAN DENGAN ASAS PERTUMBUHAN (*GROWTH DEVELOPMENT*)

➤ Kebijakan Pembangunan dengan Asas Pertumbuhan	130
➤ Pergeseran Makna Pembangunan dalam Asas Pertumbuhan.....	133
➤ Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan	137
➤ Desentralisasi, Demokrasi Lokal dan Pembangunan Daerah.....	140
➤ Konsep Komunikasi Pembangunan.....	145

Bagian Kedelapan

PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN SOSIAL PERSPEKTIF KRITIS

➤ Demokratisasi.....	163
➤ Revolusi Industri.....	170
➤ Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	172
➤ Globalisasi.....	175
➤ <i>Transactive Planning</i>	181
➤ Issue Gender	184

Bagian Kesembilan

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**

➤ Kebijakan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan...	190
➤ Penegakan Hukum Lingkungan	194
➤ Potret Lingkungan Hidup di Daerah	196
➤ Dampak Kebijakan Pembangunan, Perubahan Sosial dan Kerusakan Lingkungan.....	199
➤ Solusi dan Strategi Kebijakan	203
➤ Pendekatan Kearifan Lokal dan Lingkungan.....	211
➤ Pendekatan dalam Pembelajaran Kearifan Lokal.....	217

Daftar Pustaka	231
-----------------------	------------

Daftar Pustaka

- Aiquni, M dan Susilawardani. 2002. *Pembangunan yang tidak Berkelanjutan, Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*. Transmedia Global Wacana, Yogyakarta.
- Andi M. Akhmar dan Syarifuddin, 2007. *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*, PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI dan Masagena Press, Makasar
- Assa'di Husain. 2009. *Islam dan Perubahan Sosial*. <http://abstrakkonkrit.wordpress.com/2009/05/01/islam-dan-perubahan-sosial/> [5 September 2009]
- Azwar, Asrul, Dr, 1995: *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Bakti Setiawan, 2006. *Pembangunan Berkelanjutan dan Kearifan Lingkungan*. Dari Ide Ke Gerakan, PPLH Regional Jawa, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, Yogyakarta
- Berger, Charles R, dkk, 1987, *Handbook of Communication Science*, The Publisher of Professional Social Science.
- Brennan, Andrew. Lo. Yeuk-See, 2002. *Environmental Ethics, The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Edward N Zalta (ed.), URL
- Country Gender Assessment: Indonesia*," Southeast Asia Regional Department, Regional and Sustainable Development Departement, Asia Development Bank, Manila, Philippines, July 2006.
- Depari, Eduard dan Mc Andrew, Collin, 1991. *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*, Gajah Mada University: Yogyakarta.
- Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, *Status Lingkungan Hidup Surabaya*, 2009.
- Effendy, Onong Uchjana, 1987. *Komunikasi dan Modernisasi*, Alumi : Bandung.
- Fact Sheet: "Migration, Remittance, and Female Migrant Workers,"* Female Migrant Workers Research Team Bank Dunia (World Bank), Januari 2006.
- Francis Wahono, 2005. *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta
- Giddens, Anthony. 2000. *The Third Way : Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial* (terjemahan Ketut Arya mahardika) Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

- Gunggung Seno Aji, 2003. *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy Dalam Mengelola Hutan dan Lingkungannya*, Tesis S2 Ilmu Kehutanan, UGM, Yogyakarta <http://kejawen.co.cc/pranoto-mongso-aliran-musim-asli-jawa>. Kejawen: Pandangan Hidup dan Falsafah Kehidupan Orang Jawa, diakses 26 Januari 2009.
- Harmoko, 1985. *Komunikasi Sambung Rasa*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Hartian Silawati, *Pengarusutamaan Gender: Mulai dari Mana?*. Jurnal Perempuan No. 50: Pengarusutamaan Gender, Yayasan Jurnal Perempuan, November 2006.
- Hendropuspito. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius
- Hettne, Bjorn, 1982. *Ironi Pembangunan di Negara Berkembang*, Sinar Harapan :Jakarta.
- Indriaswaty Dyah Saptaningrum, *Parlemen yang Responsif Gender: Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Fungsi Legislatif*, Sekretariat Jenderal DPR RI dan Proper UNDP, 2008.
- Irwandy, *Refleksi Setahun Dunia Kesehatan di Negeri Ini*, (online), Jatna Supriatna, 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Kajun Suprpto, *Evaluasi Keterwakilan Politik Perempuan Pasca-Pemilu 2009*, makalah disampaikan dalam diskusi Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR RI, 19 Agustus 2009.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997. *Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup, *Panduan Praktis Pemilahan Sampah*, 2008.
- Leya Cattleya, 2005. *Pelebagaan Akuntabilitas Pengarusutamaan Gender: Bukan Sesuatu yang Mustahil*, Jurnal Perempuan No. 50: Pengarusutamaan Gender, Yayasan Jurnal Perempuan, November 2006. Panduan dan Bunga Rampai Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender, BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan UNFPA,
- M. Baiquni dan Susilo Wardani, 2002. *Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan*. Penerbit Transmedia Global Wacana. Yogyakarta
- Malik, Dedy Djamaluddin, 1991. *Komunikasi Pembangunan: Perspektif Depedensia* :Bandung.
- Marfai, M.A. 2005. *Moralitas Lingkungan*, Wahana Hijau, Yogyakarta
- Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2002.

- Miller. G.T. Jr. 1995. *Environmental Science Sustaining the Earth*. Wadsworth Publishing Co. Belmont.
- Mochamad Indrawan, Richard B. Primack dan Jatna Supriatna, 2007. *Biologi Konservasi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Muh Aris Marfai, 2005. *Moralitas Lingkungan: Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan, Wahana Hijau dan Kreasi Wacana*, Yogyakarta.
- Mustofa, H.A., 1997: *Kamus Lingkungan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nababan, 1995. *Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Analisis CSIS : Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan. Tahun XXIV No. 6 Tahun 1995
- Nasruddin Anshoriy dan Sudarsono, 2008. *Kearifan Lingkungan, Dalam Perspektif Budaya Jawa*, Yayasan Obor Indonesia.
- Norman, C & Webwr, A, *Social Health insurance a Guidebook for planning*, Genewa: WORLD Health Organization, 1994.
- Octaviany Tuti, *Jamkesmas dan Tantangannya*, Anugerah Pharmindo Lestari
- PPLH Regional Jawa, 2006. *Kearifan Lingkungan Untuk Indonesiaku*, PPLH Jawa, Yogyakarta
- Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Cet. ke-2, Mei. Jakarta : Rineka Cipta.
2003. sampah, dikunjungi melalui <http://www.google.com/...../> tanggal 29 Maret 2009.
- Rimbo Gunawan, Juni Thamrin dan Endang Suhendar, 1998. *Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat*, Akatiga, Bandung
- Rogers, Everett M dan Shoemaker, F Floyd, 1981. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*, Usaha Nasional : Surabaya.
- Soekanto, S. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo.
- Sony Keraf, 2006. *Etika Lingkungan*. Kompas, Jakarta
- Sukowati Praptining. 2010. Hasil Penelitian: *Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Masa Depan yang Berwawasan Lingkungan*. Jurnal Agriva, UB Malang
- 2009. Hasil Penelitian: *Kebijakan Tata Ruang Kota Hijau di Kota Malang*. Jurnal Kebijakan Publik MAP UGM Yogyakarta.
- Sumarwoto. 2003. *Menuju Jogja Propinsi Ramah Lingkungan Hidup, Agenda 21 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sunu, Pramudya, 2001: *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO – 14001*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

- Surjadi Soeparman.2006. *Mengapa Gender Mainstreaming Menjadi Aksi Nasional?* dalam Jurnal Perempuan No. 50: Pengarusutamaan Gender, Yayasan Jurnal Perempuan.
- Susanto, Astrid, 1977. *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Cipta : Jakarta.
- Wardhana, Wisnu Arya, 1995: *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Andi Offset, Yogyakarta.

Peraturan Perundangan:

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866)
- Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.17 thn 2001 tentang Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yg Wajib Dilengkapi AMDAL
- PP No.27 tahun 1999 dan Kepmen LH No.12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup .
- Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No.85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.
- Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang. Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan dataran hutan dan lahan .
- Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tentang. Pengelolaan B3.
- Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur/ Bupati ttg. Pengelolaan Lingkungan.